

## Studi Historis Sekolah Kedokteran Di Indoensia Abad XIX

Aulia Novemy Dhita SBK

Program Studi Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya

Email: [aulianovemydhita@unsri.ac.id](mailto:aulianovemydhita@unsri.ac.id)

**Abstrak:** Pandemi Covid-19 saat ini menggemparkan dunia. Berbagai pihak dari seluruh negara, putar haluan fokus pada Covid-19, terlebih tenaga medis. Peristiwa semacam ini pernah dialami Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang kewalahan menghadapi penyakit Cacar. Berangkat dari peristiwa tersebut, sangat menarik untuk mengangkat permasalahan yaitu bagaimana sejarah sekolah kedokteran di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk merekonstruksi sejarah sekolah kedokteran di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah kedokteran di Indonesia berawal dari epidemi Cacar yang melanda Jawa pada abad ke-19 dan perkembangannya tidak lepas dari Politik Etis. Pemerintah Kolonial Belanda lalu membentuk Dokter Djawa School, yang kemudian bermetamorfosa menjadi STOVIA dan Geneeskundige Hoge School. Berbagai kebijakan dan revitalisasi kurikulum mewarnai perjalanan sekolah kedokteran di Indonesia. Saat ini sekolah kedokteran tersebut termasuk pendidikan vokasi dan fakultas kedokteran pada lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sekolah, Kedokteran, Indonesia, XIX

**Abstract:** The Covid-19 pandemic is now shocking the world. Various parties from all countries, turn the focus on Covid-19, especially medical personnel. This kind of event had been experienced by Indonesia during the Dutch Colonial Government who were overwhelmed by smallpox. Departing from these events, it is very interesting to raise the issue of how the history of medical schools in Indonesia. The purpose of this study is to reconstruct the history of medical schools in Indonesia. The method used is the historical method which includes heuristic stages, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that medical schools in Indonesia originated from the smallpox epidemic that plagued Java in the 19th century and its development was inseparable from the Ethical Policy. The Dutch Colonial Government then formed Dokter Djawa School, which then metamorphosed into STOVIA and Geneeskundige Hoge School. Various policies and curriculum revitalization coloring the journey of medical schools in Indonesia. Currently the medical school includes vocational education and medical faculties at higher education institutions in Indonesia.

**Keywords:** School, Medicine, Indonesia, XIX

### Pendahuluan

“Saat Gawat Perawat” menjadi *Cover Story* salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Masih pada surat kabar yang sama, artikel berjudul “Wabah Corona, Dokter Spesialis Paru di Indonesia Cuma 1.106 Orang”, melaporkan bahwa menurut Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Indonesia akan mengalami kekurangan dokter spesialis paru apabila kasus Corona meningkat. Untuk

menanggulangi kondisi tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan mengerahkan tenaga medis muda untuk membantu menangani pasien Covid-19 (Corona Virus Disease, 2019). IDI akan melakukan seleksi dan pembekalan terhadap para tenaga medis muda, serta ditempatkan di pelayanan kesehatan. Bermula ketika kasus pertama Covid-19 di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Masyarakat dunia terjangkau virus yang menyerang

pernapasan ini. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia berjumlah ribuan dan ratusan orang terinfeksi. *World Health Organization* (WHO) pada *website* (<https://covid19.who.int/>) per tanggal 26 April 2020, melaporkan beberapa negara dengan jumlah tertinggi yang terjangkit Virus Corona diantaranya Amerika Serikat (860.772); Spanyol (219.764); Italia (192.994); Jerman (152.438) dan Inggris (143.468) serta negara-negara lain di dunia.

Masih dalam laporan WHO pada laman *websitenya*, kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia dengan jumlah tertinggi diantaranya Amerika Serikat (44.503); Italia (25.969); Spanyol (22.524); Perancis (22.212) dan Inggris (19.506) serta negara-negara lain di dunia. Sedangkan di Indonesia, yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah sebanyak 8.607 kasus dan 720 meninggal dunia. Masyarakat biasa dan sejumlah tokoh penting negara, terpapar Covid-19 seperti Pangeran Charles (Inggris) dan Budi Karya (Menteri Perhubungan-Indonesia).

Pada masa lampau, raja-raja di Nusantara juga terpapar wabah penyakit yaitu Kolera yang menyerang Sultan Alauddin Mahmud Syah (Sultan Aceh), Sisingamaraja XI (Raja Batak) dan Raja Josephus Mbako II (Raja Sikka-Nusa Tenggara Timur); Malaria menjangkit Sultan Syarif Hasyim (Kesultanan Siak Sri Indrapura); suatu penyakit yang diderita oleh Sultan Agung (Kesultanan Mataram)

dan Cacar melanda Pengeran Antasari (Sultan Banjar) (Sitompul, 2020). Rentannya para petinggi negara terpapar virus diduga karena interaksi langsung yang dilakukan dengan masyarakat. Sebagai pejabat negara, dalam kondisi apapun tetap melakukan pengabdian bagi warga negara.

Selain itu pihak yang paling rentan terinfeksi Covid-19 adalah tenaga medis. Sehingga dalam proses perawatan pasien positif Covid-19, mereka harus melengkapi diri dengan Alat Pelindung Diri (APD). Menurut CNN Indonesia (30 Maret 2020), sebanyak 81 tenaga medis positif Covid-19 di Jakarta. Para tenaga medis (dokter dan perawat serta lainnya) yang sedang “berperang untuk menang” melawan pandemi, memiliki sejarah panjang terutama di Indonesia.

Sebelum Covid-19, pada abad ke - 6, wilayah kekaisaran Romawi Timur pada masa Kaisar Justinian muncul wabah Justinian (Pes). Di wilayah Asia Barat Daya muncul pula wabah *Shirawayh* di Al-Mada'in-Persia (627-628 M); *Amwas* di Arab pada tahun (638-639 M); *Al-Jarif* (688-689 M) dan *Al-Fatayat* (706 M); serta *Al-Asyraf* di Irak dan Suriah (716-717 M) (Putri, 2020). Wabah juga melanda wilayah Eropa dan Amerika. Pada abad ke-11 Kusta melanda Eropa, Maut Hitam di Eurasia pada abad ke-13, Cacar mewabah di Amerika dan Pasifik pada abad ke-16, Kolera pada abad ke-19 dan Flu Spanyol serta Polio pada awal abad ke-20 (Putri, 2020). Khususnya di

Indonesia, sejarah mencatat pada abad ke-19 Hindia Belanda pernah dilanda wabah Pes, Malaria, Cacar, Kolera, Disentri dan Tifus. Wabah penyakit tersebut berdampak pada peningkatan angka kematian. Misalnya saja penyakit Kolera yang menular masyarakat Batavia pada tahun 1864. (Sitompul, 2020). Dari berbagai penyakit yang mewabah di Hindia Belanda pada saat itu, Cacar merupakan yang terparah.

Menurut Boomgaard (dalam Baha'uddin, 2006) penyakit Cacar pertama kali masuk pada tahun 1644 di Batavia kemudian menyebar di Priangan, Bogor, Semarang, Banten dan Lampung. Barulah pada abad ke-19 menurut catatan John Crawford, penyakit Cacar memberikan dampak yang sangat besar bagi pribumi. Pada tahun 1846-1847, Cacar menjadi epidemi bagi masyarakat Jawa. Penyakit Cacar menyebabkan angka mortalitas yang tinggi di Jawa (Baha'uddin, 287) karena keterbatasan tenaga kesehatan dan belum ditemukan vaksin Cacar.

Pada saat ini penanggulangan penyakit Cacar dilakukan dengan memberikan vaksin cacar pada anak sejak usia 1 tahun melalui kegiatan imunisasi, sehingga dapat menekan dampak penyakit Cacar. Di bidang ekonomi, penyakit Cacar berdampak pada pemasaran tanaman yang merupakan bagian dari Sistem Tanam Paksa. Adapun dibidang pendidikan, darurat penyakit Cacar memantik Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan lembaga

pendidikan bernama *Dokter Djawa School*. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah ini mengubah namanya menjadi STOVIA. Lalu *Geneeskundige Hoge School* dan saat ini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran pada salah satu universitas di Indonesia.

Epidemi Cacar yang mewabah di Hindia Belanda pada abad ke-19 membawa berkah. Salah satunya dibidang pendidikan dengan kelahiran *Dokter Djawa School* atau sekolah mantri cacar sebagai cikal bakal sekolah (lembaga pendidikan) kedokteran di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi sejarah sekolah kedokteran di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji karena beberapa faktor yaitu model penanganan dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda dengan menghasilkan dokter pembantu melalui kebijakan pendirian sekolah kedokteran.

Serta untuk meningkatkan kebutuhan dokter. Para dokter ini selain memberikan edukasi mengenai penyakit cacar dan lainnya, juga memberikan vaksin. Terkait dengan hal tersebut, sebaiknya Indonesia berani membuat kebijakan kesehatan mandiri misalnya menciptakan vaksin oleh lembaga pendidikan kedokteran di Indonesia.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu suatu penelitian yang melewati analisis

kritis terhadap rekam jejak masa lalu, merekonstruksi peristiwa yang imajinatif melalui data-data terkait dengan mengikuti tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1985). Tahapan heuristik dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang relevan mengenai sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, mulai dari sejarah *Dokter Djawa School*, *STOVIA*, *Geneeskundige Hoge School*, sejarah pendidikan di Indonesia dan lainnya, dari artikel, prosiding dan buku.

Selain tema pendidikan, tema mengenai Covid-19 perlu untuk diangkat terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh tenaga medis. Tahap selanjutnya yaitu kritik sumber yaitu menilai seberapa jauh kualitas sumber yang diperoleh untuk menjelaskan suatu tema. Dalam metode historis kritik terbagi dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik intern terkait dengan penilaian terhadap sumber data apakah dapat digunakan sebagai fakta sejarah. Sedangkan kritik ekstern adalah penilaian terhadap sumber data apakah tepat digunakan sebagai referensi (Fauziyah, Yusuf, & Alian, 2020). Pada penelitian ini sumber yang digunakan adalah artikel yang terutama berkaitan dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Salah satu artikel yang digunakan yaitu berjudul "Sejarah Pendidikan Dokter di Indonesia" yang ditulis oleh Radiopoetro dari Bagian Anatomi, Embryologi dan Anthropologi

pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Artikel ini diterbitkan pada tahun 1976 pada *Journal of Medicine Sciences*. Berdasarkan informasi diatas, artikel tersebut ditulis oleh dosen/dokter dari Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kalimat pada artikel tersebut masih kaku dan menggunakan istilah-istilah yang arti atau sinonimnya perlu dikaji. Misalnya istilah korps pada kalimat "Saran ini dipakai oleh Bosch untuk mengusulkan membentuk suatu *korps* dokter.....". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'korps' adalah orang (badan, organisasi) yang merupakan satu kesatuan. Penggunaan istilah *korps* biasanya merujuk pada bidang militer. Namun jika disesuaikan dengan kalimatnya, maka korps yang dimaksud adalah tenaga kesehatan.

Untuk mengkaji hal tersebut, artikel ini disandingkan dengan artikel lain yang ditulis oleh sejarawan misalnya Baha'uddin (dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) dengan artikel berjudul "Dari Mantri Hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial Dalam Penanganan Penyakit Cacar di Jawa Abad XIX-XX" dan Aditia Muara Padiatra dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan artikel berjudul "Melawan Wabah: Sejarah Sekolah Dokter Djawa 1851-1899". Berikutnya yaitu tahapan interpretasi dan historiografi. Interpretasi atau penafsiran merupakan hasil pemikiran dari sumber-sumber data

yang diperoleh. Pemikiran ini menghasilkan pandangan baru yang bersifat ilmiah, untuk kemudian disajikan dalam penulisan sejarah atau historiografi. Dalam tahap historiografi, peristiwa sejarah ditulis secara kronologi dan tersusun dengan menjawab sebab akibat dari peristiwa sejarah (Irwanto, 2014). Penafsiran yang dilakukan pada penelitian ini berkenaan dengan *konversi* lembaga pendidikan pada masa Pemerintahan Belanda dengan saat ini.

Misalnya, STOVIA merupakan lembaga pendidikan kedokteran yang pada saat ini dapat disebut juga sebagai politikenik kesehatan atau fakultas kedokteran, walaupun syarat untuk menjadi siswa STOVIA adalah ELS (sekolah dasar) atau MULO (sekolah menengah pertama). Karena pada saat ini syarat menjadi siswa politeknik atau fakultas adalah lulus sekolah menengah atas. Namun jika dilihat dari kurikulum ELS dan MULO, kedua sekolah ini pada saat itu setara dengan sekolah menengah atas.

Barulah pada tahun 1927, STOVIA yang telah berubah menjadi GHS mensyaratkan siswanya lulusan dari sekolah menengah atas (AMS). Selain itu, merujuk pada profil lulusan *Dokter Djawa School* yaitu sebagai mantri cacar atau vaksinator atau STOVIA serta GHS sebagai dokter, maka lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan profil lulusan politeknik kesehatan yaitu analis kesehatan, farmasi, keperawatan dan bidan (diatur dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018. Tahap akhir dalam metode penelitian ini yaitu historiografi. Setelah melalui proses kritik dan interpretasi maka dipilih istilah yang tepat untuk dituliskan dalam penelitian ini. Misalnya, korps diganti dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya perubahan syarat masuk, masa studi, mata pelajaran hingga nama sekolah maka serangkaian perubahan tersebut disebut dengan revitalisasi kurikulum yang seyogyanya dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas lulusan.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Sejarah Dokter Djawa School

Sekolah kedokteran bumiputra atau *Onderwijs van Inlandsche élèves voor de geneeskunde en vaccine* berhasil didirikan pada tanggal 1 Januari 1851 di Weltevreden (Jakarta) atas kerja keras dr. Willem Bosch, yaitu Kepala Dinas Kesehatan di Hindia-Belanda (1849-1853), melalui Keputusan Gubernurnemen (pemerintah) tanggal 2 Januari 1849 No. 22 tentang pelatihan pemuda Jawa sebagai tenaga medis dan mantri cacar. Dalam catatan *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*, No. 22, pada 2 Januari 1849 (dalam Sari dan Cory Liana, 2013: 168) isi Keputusan Gubernurnemen tersebut yaitu:

1. Pemerintah Hindia Belanda akan memberikan pendidikan kepada 12 pemuda Jawa di rumah sakit militer

untuk menjadi dokter pribumi dan mantri cacar (*Vaccinateur*).

2. Berasal dari keluarga yang baik dan menguasai menulis serta membaca dalam bahasa Melayu dan Jawa. Setelah lulus mereka akan bekerja pada dinas pemerintahan sebagai mantri cacar.
3. Para siswa akan mendapatkan fasilitas berupa gaji sebesar f.15 dan perumahan.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia-Belanda No. 10, tanggal 5 Juni 1953, para lulusan lembaga pendidikan ini diberi gelar Dokter Jawa dan lembaga pendidikannya disebut *Dokter Djawa School*. Untuk menjalankan *Dokter Djawa School*, dr. Willem Bosch mengangkat dr. Pieter Bleeker, seorang Perwira Pesehatan (*Officier van Gezondheid*) di Dinas Kesehatan Tentara sebagai pimpinan lembaga pendidikan atau rektro (Padiatra, 2015).

Berdasarkan keputusan Pemerintah Hindia Belanda, pendirian lembaga pendidikan kedokteran dilatarbelakangi oleh kondisi sosial dan politik di Jawa yaitu meluasnya wabah penyakit Cacar, Kolera, Disentri, Malaria dan Tipus; meningkatnya kebutuhan tenaga medis untuk menangani masyarakat Jawa yang terkena wabah penyakit serta menggantikan peran orang pintar atau dukun yang pada saat itu menjadi andalan pribumi. Pertimbangan lain yang lebih penting mengenai pendirian lembaga pendidikan kedokteran adalah faktor ekonomi yaitu mendidik para bumiputra menjadi mantri cacar, lebih

mudah dibandingkan mendatangkan dokter dari Eropa. Pada periode awal berdirinya, *Dokter Djawa School* memiliki siswa sebanyak 12 orang yang disebut *eleves*. Mereka menempuh pendidikan selama dua tahun dengan tujuan pembelajaran yaitu memiliki keterampilan vaksinasi dan pengetahuan untuk menolong masyarakat yang menderita penyakit-penyakit seperti demam dan penyakit ringan lainnya. Lulusan pertama diwisuda pada tahun 1853 dengan menggunakan gelar Dokter Jawa (Radiopoetro, 1976).

Pada tahun-tahun selanjutnya, *Dokter Djawa School* mengalami revitalisasi terkait dengan syarat penerimaan siswa, kurikulum, masa studi dan gelar para lulusan. Revitalisasi pertama pada tahun 1864, yaitu masa studi menjadi tiga tahun dan para lulusannya dapat bekerja di Pemerintahan Hindia-Belanda dengan status pegawai rendah serta mendapatkan izin praktek secara mandiri (Slamet Riyadi dalam Sari dan Cory Liana, 2013).

Namun harapan terakhir ini harus *kandas*. Pada tahun 1867 izin praktek dicabut oleh Pemerintah Hindia-Belanda karena adanya kekhawatiran terhadap kegiatan para dokter dari bumiputra. *Habis gelap terbitlah terang*, pada tahun 1890 Pemerintah Hindia-Belanda mengembalikan izin praktek dokter Djawa. Revitalisasi kedua terjadi pada tahun 1874/1875 dimana syarat penerimaan siswa *Dokter*

*Djawa School* yaitu lulusan dari sekolah negeri untuk pribumi (*Inlandsche Gouvernementsschool*) atau lulus tes masuk. Pada tahun tersebut, *Dokter Djawa School*

akan menerima sebanyak 100 calon siswa dengan rentang usia 14-18 tahun. Bahasa pengantar pembelajaran yang digunakan adalah bahasa Belanda.

**Tabel 1. Kurikulum *Dokter Djawa School* (1851)**

Syarat	: 1. Berasal dari keluarga Jawa dan memiliki kepribadian yang baik. 2. Mampu membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu
Profil Lulusan	: Mantri cacar dan tenaga medis pembantu di rumah sakit militer
Masa Studi	: Dua Tahun
Bahasa Pengantar	: Bahasa Melayu dan Jawa
Mata Pelajaran	: Bahasa Belanda, Berhitung, Ilmu Ukur, Astronomi, Kimia Anorganik, Ilmu Alam, Mekanika, Geologi, Botani, Zoologi, Anatomi dan Fisiologi, Penganta Patologi, Ilmu Kebidanan dan Ilmu Bedah

(Data diolah dari Sari dan Cory Liana (2013) dan Padiatra (2015))

Masa studi pendidikan menjadi tujuh tahun terdiri dari bagian pertama dan kedua. Pada bagian pertama, masa studi selama dua tahun dimana para siswa memperoleh mata pelajaran pengantar (*voorbereidende afdeling*) meliputi, Bahasa Belanda, Fisika Dasar, Sejarah, Matematika dan Geografi Belanda serta Hindia. Pada bagian kedua dengan masa studi selama lima tahun.

Para siswa akan mendapatkan mata pelajaran inti (*geneeskundige afdeling*) yang diantaranya akan melakukan praktek untuk meningkatkan kompetensi di bidang medis. Selama proses pembelajaran para siswa akan didampingi oleh dua guru untuk mata pelajaran pengantar, tiga perwira kesehatan dan dua dokter jawa untuk mata pelajaran inti (Padiatra, 2015; Radiopoetro, 1976). Revitalisasi *Dokter Djawa School* selanjutnya dipusatkan pada kompetensi lulusan agar memiliki kompetensi di bidang medis. Kondisi ini berangkat dari fakta bahwa

kurangnya pengetahuan dan kompetensi siswa tentang bidang kesehatan. Misalnya pada tahun 1886 dilaporkan bahwa para siswa kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang Anatomi dan Obstetri (1889). Menurut Radiopoetro (1976), hal ini karena kurang memadainya alat praktek anatomi bagi para siswa. Selain itu, materi Obstetri lebih banyak disajikan dalam bentuk teori.

Mengenai kompetensi lulusan, tampaknya pihak lembaga pendidikan menilai bahwa lulusan sekolah bumiputra kurang memiliki pengetahuan yang baik untuk mengikuti pembelajaran di *Dokter Djawa School*. Sehingga pada tahun 1890, *Dokter Djawa School* menerima siswa lulusan dari sekolah Belanda (*Europeesche Lagere School/ELS*). Karena berdasarkan laporan bahwa pada tahun 1883-1889, siswa dari lulusan ELS memiliki prestasi yang lebih baik. Walau demikian, calon siswa tetap mengikuti tes ujian masuk (tes bahasa Belanda dan berhitung)

(Radiopoetro, 1976). Pada masa-masa selanjutnya *Dokter Djawa School* terus berbenah diri. Para siswanya tidak hanya dibekali kompetensi agar menjadi mantri cacar, namun lebih dari itu, menjadi dokter setara dengan dokter dari Eropa. Geliat lembaga pendidikan kedokteran ini semakin memuncak saat mengubah namanya menjadi STOVIA (*School ter opleiding van Indische Artsen*).

### B. Sejarah Stovia

STOVIA merupakan sekolah pendidikan dokter bagi bumiputra. Selain STOVIA, pada tahun 1913 didirikan pula lembaga pendidikan serupa yaitu *Nederlands Indische Artsen School* atau NIAS di Surabaya (Djumhur, 1974). Pada awalnya para siswa STOVIA melaksanakan proses pembelajaran di gedung disamping rumah sakit militer sebelum memiliki gedung di Salemba-Jakarta, yang mulai dibangun pada tanggal 26 Agustus 1916. STOVIA di Salemba, baru benar-benar aktif pada tahun 1921 (Radiopoetro, 1976).

Para siswa STOVIA melaksanakan proses pembelajaran di gedung STOVIA yang mulai dibangun oleh Dr. H.F. Rool pada tahun 1899. Dana yang diperolehnya untuk membangun gedung dari para pegawai swasta Belanda sebanyak €178.000, setara dengan Rp. 2.848.250,67 (€1= 1Rp. 6.001,41). Itulah sebab beliau kemudian dikenal sebagai Bapak STOVIA (Safwan, 1985). Calon siswa STOVIA berasal dari lulusan ELS (sekolah dasar Belanda),

dengan masa studi 10 tahun. Lulusan STOVIA dan NIAS awalnya bergelar *Inlandsch Arts* (Dokter Bumiputra) namun berubah menjadi *Indisch Art* (Dokter Hindia). Mulai tahun 1914, baik STOVIA ataupun NIAS menerima siswa dari lulusan MULO (*Meer Uitgrebreid Lager Onderwijs*) (Panjaitan, 2019), dengan masa studi 9 tahun. MULO adalah sekolah menengah pertama pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang diperuntukkan bagi pribumi, golongan Cina dan Eropa yang telah lulus sekolah dasar (Ricklefs, 2007).

Para siswa STOVIA dikenal sebagai peletak momentum pertama kebangkitan nasional. Salah satu tokoh Belanda yang turut menghiasi pemikiran siswa STOVIA adalah Douwes Dekker. Gudang ilmu miliknya menjadi tempat favorit siswa STOVIA. Melalui membaca mereka melihat dunia. Lalu membandingkannya dengan kondisi yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Buah pikiran ini kemudian menjadi topik diskusi dikalangan mereka dan menuangkan pandangannya dalam surat kabar.

Gelora perjuangan semakin membara tatkala bertemu dengan dr. Wahidin Sudirohusodo (seorang pengajar *Dokter Djawa School* pada tahun 1872 dan redaktur *Retnodhoemilah* pada tahun 1901) (Sari dan Corry, 2013). Kesatuan tujuan dan pandangan melahirkan wadah perjuangan yang lebih besar yaitu Budi Utomo. Organisasi ini tentu tak lepas dari peran

siswa STOVIA terutama Soetomo dan rekan-rekannya seperti M. Suradji, M. Mohammad Saleh, Mas Suwarno, Muhammad Sulaiman, Gunawan dan Gumberg (Muljana, 2008) Organisasi ini merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan.

**Tabel 2. Mata Pelajaran di MULO**

Mata Pelajaran	Kelas		
	I	II	III
Membaca	3	3	2
Bahasa Belanda	5	5	4
Menulis			
Berhitung dan Matematika	8	9	7
Sejarah (Belanda dan Jajahan)	1	1	2
Sejarah (Dunia)	1	1	1
Geografi	3	3	3
Ilmu Alam	3	3	4
Bahasa Perancis	2	4	4
Bahasa Inggris	4	4	3
Bahasa Jerman	4	3	4
Menggambar	2	2	2
	36	36	36

(Nasution, 2001: 124)

Menjelang tahun 1927, STOVIA tidak menerima siswa baru lagi. Sebagai gantinya, dibentuk *Geneeskundige Hoge School* (GHS/Pendidikan Tinggi Kedokteran) pada tahun 1927 atas usaha para dokter Indonesia, utamanya Dr. Abdul Rivai yang menyampaikannya dalam sidang Volksraad tahun 1918 para dokter lain diantaranya J. Kajadoe, Abdoel Rasjid dan R. Soetomo (Lubis, 2008) yang terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Indonesia. GHS menerima siswa dari *Algemeen Middelbaar School* (AMS) dan *Hoogere Burger School* (HBS). AMS merupakan sekolah lanjutan dari MULO bagi pribumi. Ijazah AMS

disamakan dengan HBS untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau menduduki jabatan tertentu (Nasution, 2001). Masa studi AMS selama tiga tahun. Sedangkan HBS adalah sekolah menengah bagi orang Eropa dengan masa studi selama lima tahun. Mata pelajaran di HBS meliputi rumpun Ilmu Pengetahuan Alama (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa (Nasution, 2001).

Agar lulus GHS siswa harus menempuh masa studi selama 7 tahun yang terdiri dari satu tahun pengajaran *propedeuis*; dua tahun pengajaran kandidat; dua tahun pengajaran doctoral dan dua tahun praktek. Adapun mata pelajarannya yaitu bakteriologi, *hygiene*, anatomi patologi dan farmakologi khusus (Panjaitan, 2019). Kurikulum GHS sama dengan kurikulum sekolah tinggi kedokteran di Belanda. Lulusan GHS mendapatkan gelar *Artsen* dan dapat mempraktekkan keilmuannya tanpa terikat dengan pemerintah Hindia Belanda.

Dengan kata lain, dalam proses penerimaan calon siswa GHS tidak lagi memberikan fasilitas seperti *Dokter Djawa School* dan STOVIA (Jakarta.go.id). Selain GHS, sekolah tinggi yang dibentuk pada masa pemerintah Hindia Belanda yaitu *Technische Hoge School* (THS) atau Sekolah Tinggi Teknik di Bandung pada tahun 1920; *Rechtskundige Hoge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1924; *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* (FLeW) atau Fakultas Sastra dan

Kemanusiaan di Jakarta pada tahun 1940 serta *Faculteit van Landbouwweteschap (FvLw)* atau Fakultas Pertanian di Bogor pada tahun 1941. Kelima sekolah tinggi tersebut dibangun untuk memenuhi kebijakan politik tentang pembentukan universitas di Indonesia. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh (Hendri, 2017) mengenai Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu *Hooger Onderwijs Wet 1905* yang menjelaskan perbedaan antara pendidikan tinggi dengan universitas serta salah satu syarat universitas yaitu memiliki lima fakultas.

Selain itu *Hooger Onderwijs Wet 1924* menguraikan tentang pengambilalihan THS dari pihak swasta (KIVHTONI) pemerintah Hindia Belanda dan menjadi dasar hukum pembukaan RHS. GHS dan keempat sekolah tinggi lainnya menjadi modal awal Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan *Universiteit van Nederlandsch Indie*). Namun rencana ini tertunda akibat situasi politik menjelang tahun 1942 yaitu kemenangan Jepang atas Belanda.

Memasuki masa pemerintahan Jepang, nama sekolah tinggi kedokteran diganti menjadi *Djakarta Ika Daigaku* dan *Bandoeng Kyogo Daigaku* untuk sekolah tinggi teknik (Djojodibroto, 2004; Daulay, 2018). *Djakarta Ika Daigu* menerima siswa ex GHS dan NIAS yang belum menyelesaikan masa studinya karena kedatangan Jepang di Indonesia. Para lulusan *Djakarta Ika Daigu* akan menjadi dokter militer/PETA. Penting

untuk diketahui pemerintah Jepang tidak begitu menaruh perhatian besar pada pendidikan di Indonesia karena fokus pada kemenangan Perang Asia Timur Raya. Namun, untuk pertama kalinya pada masa ini diseluruh lembaga pendidikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Rencana pembangunan *Universiteit van Nederlandsch Indie* berlanjut saat Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1945. Namanya berubah menjadi *Universiteit van Indonesie* yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1946.

*Universiteit van Indonesie* diambil alih oleh Pemerintahan RIS pada tanggal 6 Januari 1950 setelah bergabung dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat (BPTRIS) dan berubah menjadi *Universiteit Indonesia*. Universitas ini memiliki sejumlah fakultas yang tersebar di beberapa wilayah. Fakultas Kedokteran di Jakarta (GHS), Fakultas Kedokteran di Surabaya (NIAS), Fakultas Hukum di Jakarta dan Makassar, Fakultas Teknik di Bandung serta Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor (Djojodibroto, 2004).

Fakultas-fakultas yang terletak di luar Jakarta, berkembang menjadi universitas. Misalnya pada tanggal 10 November 1954, Fakultas Kedokteran di Surabaya (NIAS), kampus yang terletak di Karangmenjangan-Surabaya, diresmikan sebagai Fakultas Kedokteran Universitas

Airlangga oleh Presiden Soekarno (Agusni, 2016). Begitupun dengan GHS (Fakultas Kedokteran) menjadi Universitas Indonesia.

### C. Sejarah Sekolah Kedokteran di Indonesia (1851-1950)

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar manusia. Melahirkan akademisi intelektual dalam menyampaikan kebenaran untuk kemaslahatan bagi masyarakat dan peradabannya. Pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak masa pra aksara. Masyarakatnya belajar dari lingkungan bagaimana bersahabat dengan alam. Memasuki masa aksara, pendidikan semakin kompleks. Mulai terbangun sistem pendidikan yang berawal dari tempat-tempat ibadah seperti Gereja, Vihara, dan Langgar (Mushola).

Memasuki masa Pemerintahan Kolonial Belanda, tujuan awal pendidikan hanya untuk orang Eropa. Namun kebutuhan pemerintah terhadap pegawai, pendidikan mulai terbuka untuk elite pribumi dan Timur Asing, disamping kebijakan Politik Etis yang merupakan opini Van Deventer yang dimuat dalam majalah *de Grids*, berjudul *Ethische Richting* pada tahun 1899. Berdasarkan hal tersebut, karakteristik pendidikan di Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dibagi menjadi tiga yaitu, pendidikan dibawah kendali *Nederlands Zendelingen Genootschap* (NZG) yaitu gereja Kristen pada masa VOC (abad 17 dan 18); pendidikan secara langsung dibawah kendali Pemerintah

Kolonial Belanda setelah VOC bubar (abad 19) dan pendidikan untuk semua terutama pribumi, akibat kebijakan Politik Etis (abad ke-20) (Supriadi dalam Supardan, 2008). Politik Etis atau Politik Balas Budi berawal dari dampak penerapan Sistem Tanam Paksa (1830-1870) dan Politik Liberal (1870-1900) yang menyebabkan penderitaan pribumi di Hindia Belanda.

Kelompok yang mengkritik dua praktek pemerintah Hindia Belanda yaitu L. Vitalis (Inspektur Pertanian); dr. Willem Bosch (Dinas Kesehatan); W.R. Baron van Hoevell (Pendeta) dan kritikan yang paling populer datang dari Multatuli (Douwes Dekker) melalui buku yang berjudul *Max Havelaar* (1860) (Daliman Dalam Prayudi, 2015). Dengan adanya Politik Etis, Pemerintah Hindia Belanda harus mengindahkan kesejahteraan pribumi melalui bidang irigasi, emigrasi dan edukasi untuk menghindari perlawanan yang dapat mengganggu kedudukannya di Indonesia.

Dalam membentuk sekolah atau lembaga pendidikan, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan empat prinsip penting, yaitu Dualistis diskriminatif yaitu adanya kelas-kelas atau perbedaan sekolah antara orang Eropa, Pribumi dan Tionghoa; Gradualis yaitu menerapkan sistem persekolahan yang lamban terutama untuk sekolah Pribumi dan Tionghoa; Kokordansi yaitu kurikulum yang diterapkan pada sekolah di Indonesia, sama dengan kurikulum yang digunakan di Belanda dan

adanya pengawasan yang ketat. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya berupaya agar Pribumi tidak melampaui orang Eropa. Walau pada perjalanannya, pendidikan menjadi senjata munculnya kesadaran untuk dapat menciptakan masa depan tanpa bayang-bayang penjajahan. Terlepas dari berbagai kepentingan politik yang melandasi, perkembangan pendidikan bagai kurva naik.

Perlahan namun pasti, lembaga pendidikan yang dibangun pada masanya menunjukkan eksistensi hingga saat ini. Tak ubahnya sekolah kedokteran. Bermula dari epidemi Cacar di Jawa, Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu langsung mengambil alih pemerintahan di Indonesia setelah VOC bubar, mulai mencari solusi tepat, murah dan terjangkau untuk mengatasi epidemi Cacar. Mengingat pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda tampaknya menekan biaya pengeluaran untuk tidak mendatangkan dokter dari Eropa.

Ialah dr. Willem Bosch, yang kemudian memberikan ide cemerlang untuk membangun sekolah mantri cacar bagi para pribumi yang kemudian disebut *Dokter Djawa School*. *Dokter Djawa School* adalah murni sekolah atau lembaga pendidikan yang dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda khusus untuk pribumi. Pemerintah Kolonial Belanda sangat loyal terhadap para siswa *Dokter Djawa School*. Terlihat dari berbagai fasilitas seperti beasiswa dan rumah untuk

para siswanya. Kebijakan ini muncul seiring dengan harapan, para dokter pribumi dapat membantu pemerintah menangani epidemi cacar yang merugikan Pemerintah Hindia Belanda. Memasuki tahun-tahun berikutnya, sekolah ini mulai melakukan revitalisasi kurikulum. Para siswa dianggap kurang cakap bahkan ketika memasuki tahun terakhir masa studi. Hal ini tentu merugikan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai sponsor siswa *Dokter Djawa School*. Revitalisasi dilakukan mulai dari syarat penerimaan, lama masa studi hingga mata pelajaran.

Faktor lain yang menyebabkan kurang cakupannya para calon dokter pribumi ini adalah minimnya alat praktek. Walau demikian, beberapa lulusan *Dokter Djawa School* patut diperhitungkan, misalnya dr. Wahidin Sudirohusodo. Seorang intelektual Jawa yang memiliki perasaan mendalam terhadap kondisi pribumi yang hidup penuh derita dibawah Pemerintah Kolonial Belanda. Ia melakukan *dakwah* kepada para siswa STOVIA.

Adalah Sutomo yang paling terkesan pada pemikirannya hingga membentuk Budi Otomo, yang hari kelahirannya pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. *Dokter Djawa School* mengganti namanya menjadi STOVIA. Profil lulusan lembaga pendidikan ini tidak lagi sebagai mantri cacar, namun dokter umum yang dapat praktek di rumah sakit militer atau milik pemerintah. Syarat menjadi siswa

STOVIA harus lulusan ELS, yaitu sekolah dasar Belanda. Artinya hanya orang-orang Belanda yang dapat melanjutkan ke STOVIA. Selain orang Eropa, pribumi juga tertarik menempuh pendidikan di STOVIA namun hanya orang-orang tertentu saja, mengingat ELS hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, elite pribumi dan Timur Asing, yang statusnya disamakan dengan orang Eropa (Nasution, 2001). Ini pula sebab syarat menjadi siswa STOVIA berasal dari lulusan ELS. Sebagai sekolah dasar Belanda, ELS menerapkan prinsip konkordansi dimana kurikulum yang diterapkan sama dengan kurikulum di Belanda.

Mata pelajaran ELS diantaranya Ilmu Alam, Dasar-dasar bahasa Perancis, bahasa Inggris dan Jerman, Sejarah Umum atau Sejarah Dunia, Matematika, Pertanian, Menggambar Tangan, Pendidikan Jasmani, Pekerjaan Tangan dan Menjahit bagi anak wanita (Nasution, 2001). Ditinjau dari mata pelajaran ELS, calon siswa STOVIA dianggap telah memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mengikuti pembelajaran di STOVIA.

Walau demikian, anak-anak pribumi memiliki kesempatan untuk bersekolah di ELS. Hal ini tergantung dengan situasi politik. Pribumi yang menjadi siswa ELS biasanya berasal dari keluarga yang memiliki stratifikasi sosial tinggi atau menduduki jabatan penting di pemerintahan. Keinginan pribumi menjadi siswa ELS agar memperoleh pekerjaan

dalam pemerintahan. Sebab menjadi pegawai pemerintah merupakan impian masyarakat, agar dipandang sebagai golongan yang terhormat, sekalipun pegawai rendah. Sampai pada akhirnya, STOVIA benar-benar menerima siswa dari pribumi dengan mengubah syarat penerimaan siswa dari lulusan MULO.

Sebagai sekolah lanjutan dari ELS, siswa MULO memiliki tingkat kognitif yang tinggi sehingga dianggap lebih mampu mengikuti kurikulum STOVIA. Menjelang 1927, STOVIA berganti menjadi *Geneeskundige Hoge School* (GHS). Kelahirannya atas kerja keras Perhimpunan Dokter Indonesia. Keistimewaan GHS adalah para lulusan dapat praktek mandiri, tanpa terikat dengan pemerintah. Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, GHS bagian dari *Universiteit van Indonesie* yaitu universitas yang dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda.

Namun pada tahun 1950 *Universiteit van Indonesie* dinasionalisasi oleh Pemerintah RIS berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1950, dengan Ir. Soerachman sebagai presiden *Universiteit van Indonesie* Itulah sebab nama GHS berubah mengikuti Bahasa Indonesia yaitu Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Sejarah sekolah kedokteran di Indonesia berawal dari *Dokter Djawa School*, yang berganti nama menjadi STOVIA hingga GHS. Berbagai revitalisasi kurikulum turut mewarnai sekolah kedokteran tersebut.

Dimulai dari syarat penerimaan calon siswa hingga masa studi, mata pelajaran dan lainnya. Selain itu, situasi politik menjadi sebab yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sekolah kedokteran. Yang paling kentara adalah ketika STOVIA menjadi 'markas' kebangkitan nasional oleh para siswanya. Bukan hanya itu, sekembalinya Belanda ke Indonesia pada tahun 1945, turut mempengaruhi GHS yang merupakan bagian dari universitas yang dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda hingga akhirnya dijadikan milik pemerintahan RIS pada tahun 1950. Mulai saat itu, GHS menjadi Universitas Indonesia sebagai fakultas kedokteran.

#### **D. Berkah Epidemi dan Lembaga Pendidikan Kedokteran di Indonesia**

Pada masa kini, kedokteran merupakan salah satu pilihan bidang ilmu yang banyak di minati. Seakan menunjukkan stratifikasi sosial yang tinggi. Namun, pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, menjadi pegawai pemerintahan merupakan idaman setiap kalangan masyarakat. Sehingga program sekolah mantri cacar, menawarkan berbagai fasilitas berupa beasiswa dan rumah dinas untuk menarik minat pribumi. Berdasarkan catatan historisnya, *Dokter Djawa School* dan STOVIA merupakan jenis sekolah yang saat ini dikenal dengan istilah Sekolah Tinggi atau Politeknik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 1 dijelaskan Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan, dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Dari penjabaran tersebut, *Dokter Djawa School* lebih tepat termasuk dalam kategori politeknik kesehatan.

Mengenai politeknik kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018, tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sesuai dijelaskan pada Pasal 1 yaitu unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dibidang kesehatan adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes. Profil lulusan poltekkes diantaranya analis kesehatan, farmasi, keperawatan dan bidan. Adapun masa studi Poltekkes ditentukan dari

pilihan program yaitu program Diploma III (D-III) selama 3 tahun atau program Diploma IV (D-IV) selama 4 tahun. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka dan Perguruan Tinggi, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Berdasarkan definisi tersebut, *Dokter Djawa School* dan *STOVIA* merupakan jenis pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Sedangkan *GHS* merupakan sekolah tinggi (pendidikan tinggi) kedokteran berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 1905 dan 1924, yang direncanakan menjadi bagian dari *Universiteit van Nederlandsch Indie*.

Selain *GHS*, pemerintah juga membentuk fakultas lain di beberapa wilayah yang pada masa Pemerintahan RIS, fakultas-fakultas tersebut dibawah naungan Universitas Indonesia. Selanjutnya memasuki tahun 1953, fakultas-fakultas tersebut berdiri secara mandiri dengan membentuk universitas. *GHS* (Fakultas Kedokteran), menjadi Universitas Indonesia, *THS* menjadi Institut Teknologi Bandung dan lainnya. Pada saat ini, untuk menempuh pendidikan tinggi vokasi, harus lulus sekolah menengah atas. Begitu juga *Dokter*

*Djawa School* dan *STOVIA* yang pada masanya calon siswa merupakan lulusan *ELS* (sekolah dasar) dan *MULO* (sekolah lanjutan/SMP). Sedangkan untuk menjadi siswa *GHS*, calon siswa berasal dari *AMS* dan *HBS* (setara SMA). *Dokter Djawa School*, *STOVIA* dan *GHS* merupakan serangkaian indah sejarah sekolah kedokteran di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini. Di bidang pendidikan darurat Cacar memiliki sumbangsih pada pendirian sekolah kedokteran yang pada saat itu bernama *Dokter Djawa School*, yang menjadi cikal fakultas kedokteran atau universitas kedokteran di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Pandemi COVID-19 yang sekarang ini mewabah ke seluruh penjuru dunia, merupakan rangkaian dari perjalanan wabah yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Diawali dengan penyebarluasan Cacar di Jawa, dr. Willlem Bosh membentuk *Dokter Djawa School* pada tahun 1851, untuk menghasilkan tenaga medis atau mantri cacar Kurikulum *Dokter Djawa School* sengaja dirancang untuk pribumi.

Sekolah ini merubah namanya menjadi *STOVIA*. Sekolah kedokteran pribumi, yang membawa arah kebangkitan nasional. Tahun 1927 *STOVIA* tidak lagi menerima siswa baru. Sekolah ini pun berganti menjadi *Geneeskundige Hoge School* (*GHS*). *Dokter Djawa School* dan *STOVIA* merupakan bentuk pendidikan

vokasi jika ditelaah berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknolodi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018. Sedangkan GHS awalnya merupakan pendidikan vokasi, namun setelah menjadi bagian *Universiteit van Indonesie*, GHS adalah fakultas yang kemudian berubah menjadi universitas. Dengan demikian, epidemi cacar abad XIX, membawa berkah bagi kelahiran lembaga pendidikan kedokteran di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Agusni, I. (2016). Kiprah Dokter NIAS-Djakarta Ika Daigaku dalam Sejarah Republik Indonesia. In *University Airlangga Press*. Surabaya.
- Baha'uddin. (2012). Dari Mantri Hingga Dokter Jawa: Studi Kebijakan Pemerintah Kolonial Dalam Penanganan Penyakit Cacar Di Jawa Abad XIX - XX. *Humaniora*, 18(3), 286-296.  
<https://doi.org/10.22146/jh.v18i3.884>
- Daulay, H. P. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djojodibroto, R. D. (2004). *Tradisi Kehidupan Akademik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Fauziyah, A., Yusuf, S., & Alian, A. (2020). Peranan Letnan I Nawawi Manaf Di Bengkulu Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 10(1), 67.  
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v10i1.4343>
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hendri, H. (2017). Kebijakan Politik Pendidikan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda Di Indonesia (1920-1942). *Diakronika*, 17(1), 32.  
<https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/14>
- Irwanto, D. (2014). *Metodelogi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja\_Publisher.
- Muljana, S. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan (Jilid 1)*. Yogyakarta: LKis.
- Nasution. (2001). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Organization, W. H. (2020). *WHO Corona Viruses Disease (Covid-19)*. Retrieved April 26, 2020 from who.int website <https://covid19.who.int>
- Padiatra, A. M. (2015). *Melawan Wabah: Sejarah Sekolah Dokter Djawa 1881-1899. Seminar Nasional Sejarah II*. Palembang, Indonesia: Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Sriwijaya.
- Panjaitan, C. D. (2019). *Perkembangan Ilmu Kedokteran Dan Nasionalisme Dokter Di Indonesia*. Retrieved 28 April, 2020 from [https://www.researchgate.net/publication/330910233\\_Perkembangan\\_Ilmu\\_Kedokteran\\_dan\\_Nasionalisme\\_Dokter\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330910233_Perkembangan_Ilmu_Kedokteran_dan_Nasionalisme_Dokter_di_Indonesia)
- Prayudi, G., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 3(1), 20-34.
- Putri, R. H. (2020a). *Nusantara Terdampak Wabah Penyakit yang Melanda Dunia*. Retrieved April 28, 2020 from [historia.id](https://historia.id/kuno/articles/nusantara-terdampak-wabah-penyakit-yang-melanda-dunia-vx2ld) website: <https://historia.id/kuno/articles/nusantara-terdampak-wabah-penyakit-yang-melanda-dunia-vx2ld>
- Putri, R. H. (2020b). *Wabah Sejak Zaman*. Retrieved April 28, 2020 from [historia.id](https://historia.id/kultur/articles/wabah-sejak-zaman-rasulullah-DWq02) website: <https://historia.id/kultur/articles/wabah-sejak-zaman-rasulullah-DWq02>.
- Radiopoetro. (1976). *Sejarah Pendidikan di Indoensia*.
- Ricklefs, M. . (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: University Gajah

Mada Press.

Safwan, M. (1985). *Prof. Dr. Bahder Djohan : Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Sitompul, M. (2020a). *Kala Kolera Menyerang Batavia*. Retrieved April 28, 2020 from historia.id website: <https://historia.id/sains/articles/kala-kolera-meny Serang-batavia-DAI9e>.

Sitompul, M. (2020b). *Raja Nusantara Korban Wabah Penyakit*. Retrieved April 28, 2020 from historia.id website <https://historia.id/politik/articles/raja-nusantara-korban-wabah-penyakit-DpgEl>

Supardan, D. (2008). Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis. *Generasi Kampus*, 1(September), 96–106.

Tanpa Nama. (2017). *Geneeskundige H*. Retrieved Mei 20, 2020 from website <https://jakarta.go.id/artikel/konten/1225/geneeskundige-hoge-school-ghs>

Wulan Sari, D. (2013). Peran Dokter-Dokter Bumiputera Alumni Stovia Di Bidang Politik (1900-1930). *Avatara*, 1(2), 167–177.